



## Koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mengatasi Rawan Pangan Di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan

Syafira Mulia Sari Pane<sup>1)</sup>, Rudi Kristian P.M<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Ilmu Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara*

E-mail: [Syafiramulia1812@gmail.com](mailto:Syafiramulia1812@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received 07 November 2022]  
Revised [28 November 2022]  
Accepted [13 Desember 2022]

### KEYWORDS

Coordination, Food Insecurity, Community.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Dinas Ketahanan Pemerintahan Kota Medan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pangan secara struktural menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. sesuai tupoksi, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan harus mampu memberdayakan seluruh komponen/perangkat daerah yang ada. Sehingga, dengan koordinasi diantara pelaku pembangunan, penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Medan dapat terlaksana secara berhasil dan berdayaguna. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori koordinasi efektif oleh Tripathi dan Reddy (1994), yaitu hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan jelas, organisasi sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan supervisi yang efektif. Hasil penelitian ini belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam memvariasikan makanan, program ini juga menyebabkan ketergantungan sehingga masyarakat tidak memiliki usaha untuk meningkatkan gizi mereka, dan kurangnya pengawasan oleh Kota Medan sehingga ada masyarakat yang menyalahgunakan bantuan.

### ABSTRACT

The Medan City Government Resilience Service is responsible for the implementation of food which is structurally the authority of the Medan City Food Security Service. according to the main task and function, the Medan City Food Security Service must be able to empower all existing regional components/devices. Thus, with coordination among development actors, the implementation of food security in Medan City can be implemented successfully and efficiently. The research method used is descriptive qualitative. Techniques for collecting data were interviews, observations, and document recording. The data obtained are then analyzed by examining all the data that has been collected which is supported by the results of interviews with the effective coordination theory approach by Tripathi and Reddy (1994), namely direct relationships, initial opportunities, continuity, dynamism, clear goals, simple organization, formulation of authority and responsibility, effective communication, and effective supervisory leadership. The results of this study have not gone well. This is due to the inability of the Medan City Food Security Service to vary food, this program also causes dependence so that people do not have an effort to improve their nutrition, and the lack of supervision by the City of Medan so that there are people who misuse aid.

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sedang mengalami tantangan yang besar yaitu permasalahan kesehatan dan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa yang akan datang. Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Dengan demikian, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, (iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (iv) status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin.

Perwujudan ketahanan pangan di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala terutama yang berkaitan dengan berbagai aspek, seperti aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Beberapa kendala dalam perwujudan ketahanan pangan berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) antara lain: masih terdapat beberapa daerah yang memiliki keterbatasan pada aspek ketersediaan pangan, kemiskinan yang tinggi, pangsa pengeluaran pangan yang tinggi, akses listrik dan air bersih yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, balita stunting yang tinggi, serta angka harapan hidup yang rendah. Pemerintah Kota (Pemko) Medan bertekad akan terus mendorong semua pihak untuk bersama-sama mencapai ketahanan pangan yang kuat di Kota Medan. Ketersediaan dan konsumsi pangan dapat menjadi masalah utama yang disebabkan oleh adanya kekurangan pemenuhan kebutuhan konsumsi semestinya dimana pada akhirnya akan berkaitan dengan standar gizi masyarakat Kota Medan.

Menurut Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan berdasarkan sumber dari Kementerian Pertanian 2019, dari 21 Kecamatan di Kota Medan dan 151 Kelurahan, terdapat beberapa daerah rawan pangan dengan jumlah sarana dan prasarana pangan yang paling rendah (Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan 2021). Suatu daerah dikatakan daerah rawan pangan yaitu daerah yang memiliki beberapa indikator yaitu konsumsi dan ketersediaan pangan domestik, keberadaan toko-toko kebutuhan pokok, penduduk tidak bekerja/pengangguran, penduduk miskin, kematian bayi, penduduk tidak akses air bersih, balita gizi kurang, dan penduduk dengan pendidikan kurang dari SD (Sekolah Dasar). Menurut data BPS 2019, Kota Medan ada sebanyak 12 kelurahan miskin yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Belawan. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kerawanan pangan yaitu didapati bayi stunting (kelainan gizi kronis), dan masyarakat LANSIA (lanjut usia) yang kurang vitamin dan tidak mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang.

**Tabel 1. Data Bayi Stunting Januari – Agustus Tahun 2021 di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan**

No.	Kelurahan	Jumlah
1.	Kelurahan Belawan Bahari	43
2.	Kelurahan Belawan Sicanang	15
3.	Kelurahan Belawan Bahagia	6

Sumber: Kelurahan Belawan Bahari 2021

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa Kelurahan Belawan Bahari memiliki jumlah bayi stunting terbanyak. Maka dari itu, diperlukannya koordinasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Puskesmas Belawan Sicanang, dan pihak Kelurahan Belawan Bahari untuk bersama dalam mengatasi salah satu penyebab kerawanan pangan ini yaitu didapati adanya bayi stunting. Sebagaimana yang dilansir pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan ([disketapang.pemkomedan.go.id](http://disketapang.pemkomedan.go.id)), pemberian makanan kepada masyarakat balita, dan khususnya lansia (lanjut usia), harus terus dilakukan secara kontinu (berkelanjutan) agar dapat mengatasi kerawanan pangan yang terjadi di Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Belawan.

**Tabel 2. Data Jumlah Masyarakat Lanjut Usia (LANSIA) di Kelurahan Belawan Bahari Tahun 2018**

No.	Identitas (Umur)	Orang	Jumlah
1.	60 – 65 Tahun	40	64,5 %
2.	66 – 70 Tahun	16	25,8 %
3.	71 – 80 Tahun	6	9,7 %
	Jumlah	62	100,00%

Sumber: Puskesmas Belawan Sicanang Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah masyarakat yang lanjut usia (lansia) di Kelurahan Belawan Bahari masih tergolong banyak. Hal tersebut membuat Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan bersama Puskesmas Belawan Sicanang terus memberikan bantuan asupan pangan kepada mereka sehingga gizi mereka sudah sesuai dengan kebutuhan umur. Jumlah lansia tersebut telah diseleksi untuk diberikannya bantuan dengan pemeriksaan terlebih dahulu sehingga masyarakat lansia yang dibantu asupan pangannya tidak memiliki penyakit penyerta. Upaya yang bisa dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah dengan memberikan konsumsi pangan yang lebih baik berupa bantuan non tunai seperti beras, susu, dan makanan B2SA (beragam, bergizi, seimbang, dan aman) untuk balita stunting dan masyarakat lansia (lanjut usia) yang kurang asupan pangan yang baik juga diberikan susu, kacang hijau, dan gula merah.



## LANDASAN TEORI

Penulis melihat bahwa, masyarakat dan pihak Kelurahan Belawan Bahari masih mengeluhkan bantuan berupa pangan seperti kacang hijau, gula merah, susu, dan protein lainnya kurang mencukupi bagi masyarakat. Bantuan kegiatan pemberian asupan pangan hanya berupa makanan mentah yang diberikan langsung kepada masyarakat yang dianggap kurang efektif karena tidak disertai dengan pendampingan secara berkala oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Puskesmas Belawan Sicanang daerah setempat sebagai penanggung jawab masalah kerawanan pangan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi beberapa masyarakat yang kurang peduli ketika dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Puskesmas Belawan Sicanang, akses yang terkadang susah dilalui seperti daerah Kelurahan Bahari sering terendam banjir karena air laut naik (pasang) yang menyebabkan pendistribusian terhambat, dan masyarakat yang memiliki masalah perkonomian dan minim akan pengetahuan tentang ketahanan pangan enggan datang ke sosialisasi.

Teori yang penulis gunakan sebagai pemandu dalam ialah teori koordinasi efektif dari Tripathi dan Reddy. Koordinasi yang efektif dapat diartikan adanya satuan tindakan dari berbagai stakeholder dalam mencapai tujuan yang satu, di mana koordinasi yang efektif tersebut memiliki sembilan indikator yaitu hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan jelas, organisasi sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab, komunikasi efektif, dan kepemimpinan supervisi yang efektif (dalam Moekijat 1994:39). Terkait dengan koordinasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam mengatasi rawan pangan di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan, penulis menemukan masalah berupa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya koordinasi dalam mengatasi daerah rawan pangan ini, yaitu kurangnya tenaga pendamping pada saat kegiatan, dan tidak adanya sistem controlling (mengawasi) dan koordinasi lebih lanjut, serta partisipasi masyarakat yang terkadang masih minim terhadap bantuan pangan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dan Puskesmas Belawan Sicanang.

Penulis juga menemukan permasalahan lain, yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan tidak mampu memvariasikan makanan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang tidak menjemput bantuan yang diberikan dikarenakan tidak sesuai dengan selera mereka. Memvariasikan menu makanan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, sehingga masyarakat dapat menerima secara utuh atas bantuan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Selain itu juga, kegiatan program bantuan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan ini sudah berjalan dari 2018, sehingga menyebabkan adanya ketergantungan dari masyarakat dengan bantuan yang datang setiap tahunnya. Ketergantungan yang dialami masyarakat menyebabkan masyarakat tidak memiliki daya upaya dari dirinya sendiri untuk meningkatkan gizi mereka secara mandiri.

Kurangnya pengawasan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dengan Puskesmas Belawan Sicanang menyebabkan adanya masalah baru yang timbul. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal mengawasi jalannya program bantuan pangan ini menyebabkan adanya masyarakat yang menyalahgunakan bantuan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan bersama dengan Puskesmas Belawan Sicanang. Penyalahgunaan bantuan yang dilakukan masyarakat berupa adanya masyarakat yang menjual kembali barang atau bahan makanan yang telah diberikan. Seperti, ditemukannya masyarakat yang menjual bantuan susu formula yang diberikan dengan alasan membutuhkan uang.

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi sehingga dapat dikaji lebih dalam (Sugiyono, 2016:9). Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran realitas dari masalah yang akan dielaborasi oleh penulis dengan menggunakan data-data yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Adapun untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk informasi yang akurat kebenarannya, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Adapun kriteria informan penulis ialah Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, pemangku kepentingan dan yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal mengatasi rawan pangan di Kota Medan, dan masyarakat yang menjadi sasaran dari program bantuan pangan yang diberikan. Dengan demikian, penulis memilih Kepala Lurah di Kelurahan Belawan Bahari, Nutrisionis Pelaksana Lanjutan di Puskesmas Belawan Sicanang, dan masyarakat (keluarga) rawan pangan di Kelurahan

Belawan Bahari sebagai informan dalam penelitian ini. Setelah informasi penulis kumpulkan, maka penulis melakukan analisis data dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data disajikan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.

Sementara untuk teknik keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi data yaitu menggunakan berbagai sumber data/informasi dari para pemangku kepentingan program dan mempergunakannya sebagai sumber/data informasi yang akan diolah lalu disajikan penulis. Kemudian membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengatasi rawan pangan di Kota Med, dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus mengatasi rawan pangan di Kota Medan. Ketahanan Pangan harus mampu memiliki tindakan dan upaya dalam mengatasi rawan pangan. Maka untuk mengatasi masalah rawan pangan itu, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder yang dapat membantu dan mempermudah dalam mengatasi masalah rawan pangan di Kota Medan khususnya di Kelurahan Bahari. Kejelasan tujuan dari program bantuan ini selain untuk mengatasi rawan pangan juga untuk mengembangkan wilayah setempat dan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam merealisasikan program bantuan ini, koordinasi yang dilakukan dengan kelurahan, puskesmas setempat, serta partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh. Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sebagai koordinator dan fasilitator harus mampu mengajak para stakeholder lainnya untuk turut aktif dalam mengatasi masalah rawan pangan di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan koordinasi dengan kelurahan dan puskesmas setempat. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan program dari kebijakan yang telah disinkronisasi sehingga dapat tercapai sesuai dengann sasaran program. Program yang dimaksud adalah program bantuan berupa pangan yang ditujukan untuk balita, ibu hamil, masyakat yang lanjut usia (LANSIA), dan bayi yang mengalami stunting. Untuk menyukseskan program bantuan ini, diperlukan adanya bantuan dari Kelurahan Bahari sebagai jembatan dalam proses pemberian bantuan, dan peran dari Puskesmas Belawan Sicanang yang akan memberikan informasi terkait standar gizi makanan yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Penulis melihat bahwa dalam mengatasi rawan pangan dan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya. Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis mengkaji koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dalam Mengatasi Rawan Pangan di Kelurahan Belawan Bahari berdasarkan syarat koordinasi efektif yang dikemukakan oleh Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:38) yang terdiri dari hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan jelas, organisasi sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab, komunikasi efektif, dan kepemimpinan supervisi yang efektif.

### Hubungan Langsung

Penulis melihat hubungan langsung atau hubungan pribadi langsung antar pelaksana koordinasi dapat dilakukan dengan komunikasi tatap muka secara langsung (direct communication). Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:38), hubungan langsung merupakan indikator yang mengharuskan adanya hubungan pribadi secara langsung antar pelaksana koordinasi dengan tujuan agar tidak adanya kecanggungan antar pelaksana koordinasi sehingga pertukaran informasi dapat lebih efektif. Melalui hubungan langsung antar pelaksana dalam mengatasi masalah rawan pangan di Kelurahan Belawan Bahari akan mempengaruhi efektivitas para pelaksana koordinasi (koordinator), sebab dari adanya komunikasi langsung akan terlihat bagaimana sistem dari koordinasi tersebut apakah sudah berjalan dengan baik atau belum berjalan dengan baik.

Pada indikator hubungan langsung terkait dengan adanya komunikasi antar stakeholder atau lembaga yang saling berkoordinasi dalam mengatasi masalah rawan pangan ini. Dimana Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan hubungan langsung dengan Kelurahan Belawan Bahari dan Puskesmas Belawan Sicanang terkait dalam mengatasi masalah rawan pangan di daerah tersebut. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dengan kelurahan dan puskesmas setempat, dapat dilihat dari adanya pertemuan langsung yang dihadiri oleh para pelaksana koordinasi (koordinator). Pertemuan tersebut memiliki tujuan tertentu seperti membahas rencana kerja, kegiatan yang sedang dilaksanakan, dan evaluasi kegiatan yang telah berlangsung.

Penulis menemukan beberapa masalah dalam Kendala yang terjadi disebabkan oleh air laut yang pasang sehingga menyebabkan banjir di beberapa daerah di Kecamatan Medan Belawan khususnya di Kelurahan Belawan Bahari. Selain itu, penulis menemukan masalah berupa masyarakat



yang masih memilih-memilih mana bantuan yang akan diberikan. Hal ini menjadi kendala karena menyebabkan bahan makanan/bantuan yang diberikan menjadi tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Jadwal rapat yang belum tersusun secara sistematis juga memicu adanya komunikasi langsung yang kurang maksimal. Hal ini menjadi masalah dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat dan lintas sektoral tentang keterlibatannya. Hal ini juga berkaitan dengan pentingnya pemahaman tujuan dan dipahami dengan selaras.

### **Kesempatan Awal**

Penulis melihat bahwa koordinasi yang berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan bentuk dari adanya tahap awal dari sebuah koordinasi yaitu perencanaan dan pembuatan kebijakan. Setiap perencanaan yang muncul dari adanya koordinasi harus ada dilakukan sebuah konsultasi bersama. Konsultasi bersama dilakukan agar penyesuaian dan penyatuan tugas dalam proses perencanaan menjadi lebih mudah dan terarah. Bentuk adanya kesempatan awal di dalam koordinasi yaitu adanya konsultasi bersama pada saat penentuan kebijakan dan penentuan rencana kerja. Menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat 1994:41), kesempatan awal merupakan syarat koordinasi yang akan mempermudah proses koordinasi pada tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijakan. Dengan perencanaan yang jelas diawal maka, penyesuaian dan penyatuan dalam proses pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah. Koordinasi yang dilakukan dalam mengatasi masalah rawan pangan ini, kesempatan awal ditunjukkan dengan adanya komitmen para pelaksana koordinasi yang tertera dalam landasan kebijakan untuk melakukan koordinasi yaitu adanya kesempatan kerja, atau aturan yang mendukung koordinasi sehingga dapat menunjukkan komitmen dari para pelaksana koordinasi itu sendiri.

Koordinasi dalam mengatasi masalah rawan pangan ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan ketiga aspek ketahanan pangan sesuai dengan tupoksinya yaitu bidang ketersediaan dan kerawanan pangan yaitu berkoordinasi dalam pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan, berkoordinasi dalam pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, berkoordinasi dalam penanganan kerawanan pangan di lingkungan Pemerintahan Kota Medan. Kesempatan awal dalam koordinasi juga ditunjukkan melalui adanya kerangka kerja yang jelas yang mendeskripsikan tugas dan fungsi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam berkoordinasi sehingga dapat menghindari adanya tumpang tindih dalam menjalankan tugas. Sistem dan alur kerja yang jelas juga sangat membantu sehingga para pelaksana dapat bekerja dengan rapi. Dalam aspek kerangka kerja yang jelas berdasarkan adanya pedoman dan petunjuk kerja yang jelas.

### **Kontinuitas**

Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:39), kontinuitas merupakan proses koordinasi yang berlangsung secara terus menerus dan mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap evaluasi. Penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengaturan kewenangan masing-masing telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 7 diatur bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah dan kewenangannya menjadi urusan pemerintah daerah.

Penulis menemukan fakta bahwa sarana sebagai bentuk adanya dukungan fasilitas yang diberikan dan disediakan oleh koordinator dan stakeholder lainnya sehingga memperlancar koordinasi dan kegiatan bantuan kepada masyarakat. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) dalam proses pemberian bantuan kepada masyarakat masih tergolong sedikit sehingga diperlukan adanya penambahan anggota. Sebagai wujud dari adanya kontinuitas dalam koordinasi pada proses pelaksanaan kegiatan bantuan kepada masyarakat rawan pangan yaitu dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sebagai koordinator. Dilakukannya evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan merupakan hal yang penting sehingga dapat menilai sejauh mana dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap bantuan yang diberikan. Sehingga koordinasi dan kegiatan dapat terus berlangsung dan semakin baik kedepannya.

### **Dinamisme**

Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:39), dinamisme merupakan suatu perubahan dalam sebuah organisasi termasuk dalam koordinasi. Koordinasi harus memiliki sifat berubah agar bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi atau terkesan tidak kaku terhadap adanya suatu perubahan. Perubahan yang terjadi di dalam lingkungan baik dalam (intern) ataupun luar (ekstern) yang dimana sangat mempengaruhi jalannya sebuah koordinasi. Dengan kata lain, koordinasi itu tidak boleh kaku dan harus mampu mengikuti perkembangan yang ada disekelilingnya. Koordinasi yang dinamis (bergerak) mampu meminimalisir terjadinya masalah di dalam koordinasi.

Koordinasi yang dinamis dapat dilihat dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi selama proses koordinasi. Wujud dari perubahan tersebut adalah kemampuan para pelaksana koordinasi melihat kekurangan dan kelebihan pada saat dilakukannya koordinasi tersebut lebih awal. Oleh karena itu, penemuan kekuatan dan kelemahan lebih awal, akan memudahkan para pelaksana koordinasi, dan dapat meminimalisir kemungkinan masalah yang akan terjadi. Koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi dalam mengatasi masalah rawan pangan di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan ini, peneliti menemukan masalah yang dianggap mampu menghambat proses dalam mengatasi masalah rawan pangan ini, yaitu terkait koordinasi di lapangan dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Dimana hal ini masih menjadi masalah eksternal yang berulang ketika melaksanakan kegiatan.

### **Tujuan Jelas**

Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:40), koordinasi yang memiliki tujuan yang jelas akan mempermudah suatu pekerjaan dan memiliki tujuan untuk menciptakan keselarasan tujuan antar pelaksana koordinasi. Tujuan yang jelas maka akan meningkatkan produktivitas sehingga organisasi maupun koordinasi yang sedang berlangsung dapat berkembang dan memiliki pengaruh bagi lingkungan sekitarnya. Aspek tujuan yang jelas ini merupakan hal penting dalam melakukan koordinasi untuk mengatasi masalah rawan pangan di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan. Dalam koordinasi untuk mengatasi masalah rawan pangan ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dengan kelurahan dan puskesmas setempat, haruslah memiliki tujuan yang jelas dengan membuat pedoman atau rencana kerja yang tersusun secara sistematis dan terperinci. Dalam hal mengatasi masalah rawan pangan ini, tujuan yang jelas ditunjukkan dengan adanya kerangka acuan kerja (KAK) Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2022.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan telah melaksanakan berbagai upaya yang mendukung tercapainya tujuan dari pelaksanaan koordinasi ini. Melibatkan para stakeholder di lapangan, dan memberikan tugas dan wewenang masing-masing dalam mengakomodir kegiatan dalam mengatasi masalah rawan pangan ini. Upaya yang telah dilakukan berupa adanya bukti kegiatan yang berisikan sasaran dan kegiatan, dan diadakannya sosialisasi dan pembinaan masyarakat terkait pangan B2SA. Sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu dengan terbina dan tertangani masyarakat/keluarga rumah tangga rawan pangan, tersedianya bantuan asupan pangan untuk mencukupi kekurangan asupan pangan bagi rumah tangga rawan pangan, dan terpenuhinya kebutuhan pangan dan meningkatnya derajat kesehatan bagi rumah tangga rawan pangan. Para stakeholder dalam koordinasi mengetahui dan memahami dengan jelas apa yang menjadi sasaran dan indikator dari program, dan berhasil merealisasikan ke masyarakat dengan melakukan pemberian bantuan, sosialisasi, dan pembinaan masyarakat.

### **Organisasi Sederhana**

Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:39), organisasi yang sederhana dalam suatu koordinasi memiliki tujuan agar koordinasi dapat menjadi lebih efektif. Struktur organisasi yang sederhana akan memudahkan terwujudnya koordinasi yang efektif. Bentuk dari struktur organisasi yang sederhana bisa dilakukan dengan penyusunan kembali bagian-bagian demi tercapainya koordinasi yang lebih baik dan efektif. Pemerintahan Kota Medan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dibidang pangan yang pelaksanaannya secara struktural menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dituntut untuk mampu memberdayakan seluruh komponen (perangkat daerah dan stakeholder) yang ada. Sehingga dengan koordinasi diantara pelaku pembangunan, maka penyelenggaraan ketahanan pangan di Kota Medan dapat terlaksana secara berhasilguna dan berdayaguna.

Dalam pelaksanaan koordinasi untuk mengatasi masalah rawan pangan di Kelurahan Belawan Bahari yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dengan Kelurahan dan Puskesmas Belawan Sicanang. Dengan adanya bantuan dan dukungan dari Kelurahan serta Puskesmas Belawan Sicanang merupakan wujud tindakan dari pihak lurah dan puskesmas setempat dalam melayani masyarakat. adanya dukungan dari organisasi lain dapat menambah daya dukung dalam mengatasi masalah rawan pangan ini dan menciptakan karakteristik agen pelaksana yang beragam. Karakteristik yang beragam inilah yang akan memberikan peluang yang berbeda pula sehingga implementasi dari program bantuan untuk mengatasi masalah rawan pangan ini dapat lebih efektif. Struktur birokrasi yang sederhana akan memudahkan para koordinator dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi masalah ini. Dimana bidang ketersediaan dan kerawanan pangan memiliki tupoksi untuk mengkoordinasikan ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan.



### **Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab**

Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:39), perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas akan mengurangi pertentangan yang mungkin terjadi antar pelaksana koordinasi dan membantu para pelaksana dalam pekerjaannya sehingga memiliki kesamaan dalam tujuan dan mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari suatu koordinasi bisa dilihat melalui perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Jika faktor ini tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan tumpang tindih (over lapping) dalam proses koordinasi.

Perumusan wewenang yang jelas akan meminimalisir beberapa kemungkinan masalah yang akan timbul seperti dapat mengurangi adanya pertentangan antara anggota satu dengan anggota lainnya, dan juga dapat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan kesatuan tujuan. Pemberian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam koordinasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan meninjau tugas dan tujuan yang akan dicapai bersama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam koordinasi dalam mengatasi masalah rawan pangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Renstra Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung koordinasi berbagai stakeholder yang terlibat dalam mengatasi masalah ketahanan pangan khususnya masalah rawan pangan. Dimana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak telah sepakat menjalin kerja sama dan saling memberikan masukan dan dukungan. Adapun pendelegasian wewenang dan tanggung jawab ini sebagai tindak lanjut dan bagian yang tak terpisahkan dari nota kesepahaman antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sebagai kepala koordinasi.

### **Komunikasi yang Efektif**

Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:41), komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan koordinasi yang baik dan berhasil. Saling bertukar informasi yang dilakukan oleh para pelaksana dapat meredakan perbedaan-perbedaan yang ada dan dapat menghindari kesalah pahaman yang mungkin terjadi. Terjadinya saling bertukar informasi satu sama lainnya secara terus menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi, dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program dapat dibicarakan dengan efektif dan efisien. Melalui komunikasi yang efektif juga, maka beberapa masalah akan dapat dicegah dan diatasi. Seperti pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi dapat dihindarkan.

Penulis melihat koordinasi dalam mengatasi rawan pangan di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan yaitu koordinasi yang terjadi dalam mengatasi masalah rawan pangan di Kelurahan Belawan Bahari memiliki alur komunikasi yang terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu komunikasi ke atas, ke bawah, dan komunikasi horizontal pada lintas sektoral. Pusat dari komunikasi yang terjalin melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sebagai leading sektor dalam mengatasi masalah rawan pangan ini. Sehingga Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan memiliki peran besar dalam menjalankan komunikasi dalam koordinasi ini. Adapun alur komunikasi ke atas yang terjalin yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dengan kepada instansi lintas sektoral dalam rapat koordinasi.

Menurut pengamatan penulis, terkait komunikasi horizontal dalam mengatasi masalah rawan pangan ini sudah terjalin. Hal tersebut terlihat dengan adanya surat kegiatan dalam mengatasi masalah rawan pangan yang surat tersebut memiliki tembusan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan, dan Dinas Sosial Kota Medan. Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan juga membangun komunikasi dan informasi yang baik kepada masyarakat terkait Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKAP Medan). Website ini bertujuan untuk menampilkan berbagai informasi mengenai harga pangan pokok, harga rata-rata komoditas pangan per harinya, dan menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Komunikasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dengan para stakeholder juga tidak akan pernah putus agar terus bisa mengatasi masalah-masalah rawan pangan kedepannya dapat menjadi langkah preventif sehingga masalah-masalah bisa terhindarkan.

### **Kepemimpinan dan Supervisi yang Efektif**

Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Moekijat 1994:42), bahwa kepemimpinan dan supervisi yang efektif akan membentuk kinerja bawahannya memiliki semangat kerja yang baik karena memiliki gambaran pemimpin yang efektif dan tegas dan bijak dalam mengambil keputusan dalam koordinasi. Salah satu faktor keberhasilan dari sebuah koordinasi adalah hakikat kepemimpinan dan supervisi. Suatu koordinasi yang dipimpin oleh pemimpin dan supervisi yang efektif maka pemimpin tersebut mampu memberikan motivasi kepada bawahannya untuk terus berjuang menuju kesuksesan, memiliki semangat kerja, produktif, berorientasi terhadap hasil dan tentunya akan memberikan dampak positif bagi para pelaksana koordinasi itu sendiri.

Dinas Ketahanan Pangan pasti membutuhkan kerja sama dengan instansi atau stakeholder lain untuk mengatasi masalah rawan pangan ini. Para stakeholder lainnya juga tetap saling memiliki wewenang dan tanggung jawabnya masing. Manfaat dari pola komando ini diharapkan para stakeholder dapat memahami instruksi-instruksi yang diberikan sehingga ketika praktik di lapangan tidak mengalami kendala. Bentuk kepemimpinan hierarki akan mempermudah dan memaksimalkan fungsi koordinasi kepada stakeholder yang terkait. Hal ini dimaksudkan agar koordinasi dalam mengatasi masalah rawan pangan ini bisa terlaksana dengan baik dan efektif dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu, dengan terkontrolnya pola kepemimpinan yang hierarki ini akan mempermudah para stakeholder mendapatkan perintah maupun instruksi yang diberikan oleh ketua koordinator yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dan Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan mengenai koordinasi yang terjalin dengan tujuan untuk mengatasi rawan pangan di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan masih belum efektif dengan indikator koordinasi yang efektif yang harus dipenuhi. Alasannya yaitu, dari segi hubungan langsung belum adanya jadwal rapat pertemuan resmi, dan masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait bantuan yang diberikan. Pada indikator kesempatan awal sudah cukup baik dengan adanya Surat Keputusan (SK) yang sah dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. pada indikator kontinuitas, ditemukannya masalah berupa yaitu masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dapat membantu Puskesmas Belawan Sicanang dan para kader pada saat pemberian bantuan.

Pada indikator dinamisme, masih belum optimal disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk mengikuti program bantuan ini. Pada indikator tujuan jelas, sudah cukup baik ditunjukkan dengan para stakeholder mengetahui tujuan dari kegiatan ini, dan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan adanya bukti kegiatan yang dilaksanakan dan adanya kegiatan sosialisasi pangan beragam, bergizi, sehat, dan aman (B2SA). Pada indikator organisasi sederhana, pelaksanaan koordinasi sudah cukup baik. Ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan sederhana yang akan mempermudah koordinasi.

Pada indikator wewenang dan tanggung jawab, koordinasi sudah terjalin cukup baik, karena para pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan surat kerja sama resmi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Pada indikator komunikasi yang efektif, koordinasi sudah berjalan cukup baik. Terlihat dengan adanya kegiatan yang akan membangun komunikasi lebih dalam dengan masyarakat, adanya website Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKAP) Kota Medan yang menyediakan informasi terkait bahan pangan di Kota Medan dan adanya layanan pengaduan masyarakat yang dipergunakan untuk masyarakat yang memiliki keluhan atau masalah terkait informasi pangan. Pada indikator kepemimpinan dan supervisi yang efektif, koordinasi sudah berjalan cukup baik. Para stakeholder melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksi, dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sebagai kepala koordinator sudah memberikan perintah dan instruksi kepada kelurahan dan puskesmas agar melaksanakan tugasnya sehingga tujuan dari koordinasi dalam mengatasi masalah rawan pangan di Kelurahan Belawan Bahari dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Moekijat. 1994. *Koordinasi: Suatu Tinjauan Teoritis*. Bandung: Mandar Maju.
- Pane, Syafira Mulia Sari. 2022. *Koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dalam Mengatasi Rawan Pangan di Kelurahan Belawan Bahari Kota Medan*. Medan: USU.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Undang – undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.